

**PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KASUS
PADA DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA KABUPATEN PEKALONGAN**



TUGAS AKHIR

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program D3 Akuntansi K. Pekalongan
pada Progran Studi Di luar Kampus Utama (PSDKU)
Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

Aryo Lelono

NIM. 40011018060052

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI K. PEKALONGAN
PROGRAM STUDI DI LUAR KAMPUS UTAMA
SEKOLAH VOKASI UNIVERSTITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2021

**HALAMAN PENGESAHAN
TUGAS AKHIR**

NAMA : ARYO LELONO
NIM : 40011018060052
FAKULTAS : SEKOLAH VOKASI
PROGRAM STUDI : DIPLOMA III AKUNTANSI
JUDUL TUGAS AKHIR : PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP
PENDAPATAN ASLI DAERAH STUDI KASUS PADA
DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN PEKALONGAN

Disetujui,

Pembimbing I



Moch. Didik Ardiyanto,

S.E., M.Si.

NIP. 196606161992031002

Pembimbing II



Muhammad Ubaidillah,

S.E., MIE.

NIP. H.7.199310252019111001

Penguji



Mutiara Tresna Parasetya,

S.E., M.Si. Ak.

NIP 19881006 201803 2 001

Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Akuntansi K. Pekalongan



Moch. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si.

NIP. 196606161992031002

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan pengetahuan, pengalaman, kekuatan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini yang berjudul "PENGARUH BELANJA MODAL TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH.". Tugas Akhir ini merupakan syarat wajib bagi setiap mahasiswa agar dapat menyelesaikan Program Studi D3 Akuntansi K. Pekalongan Universitas Diponegoro Semarang.

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan baik
2. Bapak Prof Dr. Ir. Budiyo, M. Si. selaku Dekan Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro
3. Bapak Dr. Redyanto Noor, M.Hum. selaku Ketua Lembaga PSDKU

4. Bapak Dr.Eng. Munadi, S.T., M.T. selaku Sekretaris Lembaga PSDKU
5. Bapak Moch. Didik Ardiyanto, S.E., M.Si. selaku Ketua Program Studi DIII Akuntansi
6. Bapak Muhammad Ubaidillah, S.E., MIE. selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan saran-saran serta petunjuk dan bimbingan kepada penulis
7. Seluruh Dosen dan Pegawai di PSDKU Universitas Diponegoro
8. Seluruh pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan atas ilmu dan bimbingannya selama kegiatan Kuliah Kerja Praktik berlangsung
9. Kepada kedua orang tua, serta yang telah memberikan segalanya, dari kasih sayang, perhatian, pengorbanan serta dorongan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada PSDKU Universitas Diponegoro dan doa yang tiada hentinya dari penulis dengan tulus dan ikhlas
10. Alisa Azahra yang telah memberi dukungan dan motivasi kepada penulis agar dapat menyelesaikan

tugas akhir dengan baik dan cepat.

11. Teman-teman program studi D3 Akuntansi PSDKU
Pekalongan angkatan 2018 Fakultas Sekolah Vokasi
Universitas Diponegoro
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu
dalam mendukung pembuatan Tugas Akhir.

Atas bantuan dan dorongan tersebut, penulis hanya bisa berdoa semoga amal baik yang telah diberikan kiranya dibalas oleh Allah SWT., dan penulis berharap semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, Juni 2021

Penulis

Aryo Lelono

40011018060052

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penulisan.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan	4
1.3.1. Tujuan Penulisan.....	4
1.3.2. Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Pengumpulan Data	5
1.4.1. Jenis-Jenis Data.....	5
1.4.2. Metode Pengumpulan Data.....	6
1.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA (DINPORAPAR) KABUPATEN PEKALONGAN	8
2.1 Profil	8
2.2 Visi Misi.....	9
2.2.1. Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.....	9
2.2.2. Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata.....	10
2.3 Dasar Pembentukan.....	10
2.4 Struktur Organisasi.....	11
2.5 Job Description.....	12
1. Bidang Pemuda.....	12
2. Bidang Olahraga	12
3. Bidang Pariwisata	12
2.6 Pihak-Pihak yang bekerja sama dengan DINPORAPAR	13
1. Bidang Pemuda.....	13

2.	Bidang Olahraga	13
3.	Bidang Pariwisata	13
2.7	Program kerja yang sudah terlaksana	13
1.	Pelatihan tata kelola destinasi Pariwisata	14
2.	Pelatihan Ekowisata Ecopark (Pemandu Wisata)	15
3.	Pelatihan Home Stay.....	15
4.	Festival Durian.....	16
2.8	Program Kerja yang akan Dilaksanakan.....	16
1.	POPDA	16
2.	Seleksi Paskibra	18
BAB III PEMBAHASAN		22
3.1.	Tinjauan Teori.....	22
3.1.1.	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	22
3.1.2.	Pendapatan Asli Daerah	25
3.1.3.	Belanja Daerah	27
3.1.4.	Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	31
3.2.	Tinjauan Praktik	33
3.2.1.	Objek Wisata Linggo Asri	34
3.2.2.	Buper Linggo Asri.....	35
3.2.3.	Objek Wisata Pantai Depok	36
3.2.4.	Kinerja Laporan Keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020.....	37
BAB IV PENUTUP		40
4.1.	Simpulan	40
4.2.	Saran	40
DAFTAR PUSTAKA		41
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....		42

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Profil Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan	9
Tabel 3. 1 Tingkat Efektivitas PAD	33
Tabel 3. 2 Rekapitulasi Pengunjung Objek Wisata 2016-2020	37
Tabel 3. 3 Rasio Efektivitas PAD Tahun 2016-2020.....	38
Tabel 3. 4 Rekapitulasi Belanja Modal 2016-2020.....	39
Tabel 3. 5 Rasio Pertumbuhan 2016-2020.....	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 1 Logo DINPORAPAR	9
Gambar 2 2 Struktur Organisasi DINPORAPAR	11
Gambar 2.3 Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata.....	14
Gambar 2 4 Pelatihan Ekowisata Ecopark (Pemandu Wisata)	15
Gambar 2 5 Pelatihan Homestay	15
Gambar 2 6 Kegiatan Festival Durian Kabupaten Pekalongan.....	16
Gambar 2 7 Pelaksanaan kegiatan POPDA Kabupaten Pekalongan	17
Gambar 2 8 Kegiatan seleksi Paskibra Kabupaten Pekalongan Sumber: Arsip DINPORAPAR (2021).....	18
Gambar 3. 1 Objek Wisata Linggo Asri.....	34
Gambar 3. 2 Bumi Perkemahan Linggo.....	35
Gambar 3. 3 Objek Wisata Pantai Depok	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Diterima Magang.....	43
Lampiran B. Surat Permohonan Data	44
Lampiran C. Hasil Rekapitulasi Belanja DINPORAPAR	45

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pariwisata adalah sebuah perjalanan yang dibuat untuk tujuan melepas penat maupun beban pekerjaan yang dilakukan sehari-hari supaya otak menjadi segar dan kembali semangat bekerja seperti sebelumnya. Pariwisata dapat dilakukan dengan siapa saja, kemana saja dan kapan saja supaya otak tidak merasa terbebani oleh segala rutinitas yang dilakukan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, pariwisata merupakan kegiatan wisata yang didukung dengan banyak fasilitas dan layanan baik yang berasal dari masyarakat, pengusaha maupun pemerintah.

Menurut Abdul Gani (2020), pariwisata dapat dilihat dari berbagai aspek diantaranya:

1. Manfaat dari segi ekonomi, antara lain:
 - a. Mendatangkan devisa negara
 - b. Membuka lapangan pekerjaan baru bagi tenaga siap kerja terutama penduduk di sekitar objek wisata
 - c. Menstabilkan perekonomian lokal dan penganekaragaman pekerjaan
 - d. Pembangunan daerah wisata baik di kota maupun di daerah.
2. Manfaat dari segi sosial, antara lain:
 - a. Mendorong pembelajaran bahasa asing dan ketrampilan baru yang diperoleh dari pengunjung yang datang

- b. Akan menimbulkan perasaan bangga pada masyarakat luas akan pariwisata yang ada di daerahnya
- c. Sarana dan prasarana dikembangkan untuk pariwisata juga dapat menguntungkan penduduk misalnya pembangunan toilet umum, tempat ibadah dan sebagainya
- d. Dana pariwisata telah memberikan kontribusi terhadap sekolah yang dibangun di beberapa daerah
- e. Meningkatkan dan pemeratakan pendapatan rakyat terutama yang bertempat tinggal di daerah objek wisata.

Di Indonesia banyak destinasi wisata yang sangat menarik di antaranya wisata alam, seni budaya, flora dan fauna. Objek wisata di Indonesia banyak dikunjungi oleh wisatawan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Pariwisata menjadi salah satu sumber pendapatan bagi warga sekitar maupun devisa bagi negara. Untuk meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke destinasi tersebut, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk mengelola destinasi wisata tersebut dengan baik dan benar.

Di Kabupaten Pekalongan banyak destinasi wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan diantaranya: Welo River (Petungkriyono), Watuireng(Kandangserang), Telaga Mangunan(Petungkriyono), Hutan Pinus Curug Lawe(Petungkriyono). Dari berbagai destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan hanya ada 3 destinasi wisata yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata yaitu diantaranya: Objek Wisata Linggo Asri, Buper Linggo Asri dan Pantai Depok. Untuk mempermudah pengelolaan destinasi wisata, Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan berkoordinasi dengan organisasi pemuda,

kelompok sadar wisata yang ada disekitar objek wisata, serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Dalam rangka mengembangkan potensi wisata, diperlukan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Anggaran ini disebut juga anggaran modal. Anggaran modal berasal dari berbagai sumber yaitu Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah seharusnya dapat menaikkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung. Semakin banyak belanja modal yang dikeluarkan maka diharapkan banyak pula pendapatan yang diterima dari jumlah wisatawan yang berkunjung.

Belanja modal diduga dapat meningkatkan PAD. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) yang meneliti tentang Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Darwanis dan Saputra (2014) dengan beberapa modifikasi. Pertama, periode penelitian ini menggunakan periode empat tahun, dimulai dari tahun 2016-2020. Kedua, rasio pengukuran kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan (*trend*) dan rasio efektivitas PAD. Ketiga, daerah penelitiannya dilakukan pada Kabupaten Pekalongan Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan, peneliti memutuskan hal tersebut dikarenakan peneliti ingin mengetahui pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan khususnya sektor pariwisata. Penelitian ini

sangat penting karena dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk membuat sebuah penelitian dengan judul “Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah Studi Kasus pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata”

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Ruang lingkup pada pembahasan tugas akhir yang meliputi hal-hal berkaitan dengan pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah. Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini akan dilakukan pembatasan terhadap hal-hal yang akan dibahas. Hal ini dilakukan untuk membatasi ruang lingkup penelitian serta uraian pembahasannya agar tidak menyimpang dari judul penelitian. Ruang lingkup pembahasan masalah meliputi beberapa bagian yaitu:

1. Pembahasan pengaruh belanja modal terhadap pendapatan asli daerah Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan,
2. Besarnya anggaran belanja dan pendapatan daerah khususnya pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah,

2. Untuk mengetahui besarnya belanja modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Pekalongan pada sektor pariwisata,
3. Untuk mengetahui seberapa besar pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan pada sektor pariwisata.

1.3.2. Manfaat Penulisan

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan penulisan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Menambah wawasan ilmu penulis tentang informasi akuntansi sektor publik,
2. Menambah wawasan ilmu akuntansi dalam mengelola anggaran belanja pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan,
3. Menambah wawasan ilmu akuntansi dalam menaikkan pendapatan pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

1.4 Metode Pengumpulan Data

1.4.1. Jenis-Jenis Data

Pada penyusunan penulisan Laporan Tugas Akhir ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data. Jenis-jenis data tersebut meliputi:

1. Data primer

Data primer merupakan “Data yang biasanya didapat dari subjek penelitian dengan cara melakukan pengamatan, percobaan atau wawancara” (Wiratna Sujarweni, 2019). Data primer yang penulis

dapatkan dengan cara interview dengan bendahara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah “Data yang tidak langsung diperoleh dari sumber pertama dan telah tersusun dalam bentuk dokumen tertulis” (Wiratna Sujarweni, 2019). Data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan mengenai anggaran pemerintah belanja daerah.

1.4.2. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan Laporan Tugas Akhir sebagai berikut:

1. Metode wawancara (Interview)

Metode wawancara adalah “proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman” (Wiratna Sujarweni, 2019). Penulis mengajukan pertanyaan kepada bendahara Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

2. Metode studi pustaka

Metode studi pustaka adalah proses pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku tentang akuntansi sektor publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan urutan sebagai berikut. Bab pertama menjelaskan gambaran umum pariwisata, manfaat pariwisata, penelitian yang pernah dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Bab kedua berisi penjelasan tempat penelitian yang dilakukan yaitu Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Bab ketiga menjelaskan teori yang berkaitan dengan Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan penerapannya pada tempat penelitian. Bab keempat menjelaskan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

GAMBARAN UMUM DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA (DINPORAPAR) KABUPATEN PEKALONGAN

2.1 Profil

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan, Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas pemuda olahraga dan pariwisata mempunyai fungsi antara lain:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemuda, olahraga dan pariwisata
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang pemuda, olahraga dan pariwisata
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang pemuda, olahraga dan pariwisata
4. Pelaksanaan kesekretariatan dinas

Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati dengan tugas dan fungsinya.

Gambar 2 1 Logo DINPORAPAR

Sumber: Arsip DINPORAPAR (2020)



Tabel 2. 1

Profil Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan

Profil Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan	
Alamat	: Jl. Teuku Umar-Kecamatan Kajen
Telepon/Fax	: (0285) 381783
Email	: dinporapar@gmail.com
Website	: www.dinporapar-pekalongankab.web.id

2.2 Visi Misi

Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan memiliki visi dan misi sebagai berikut:

2.2.1. Visi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

Mewujudkan Pemuda Dan Olahraga Unggul dan Berprestasi Optimal Serta Mewujudkan Pariwisata Andalan Demi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Pekalongan.

2.2.2. Misi Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata

1. Menumbuh kembangkan terwujudnya kreatifitas generasi muda yang berakhlakul karimah, mandiri, demokratis, dan berprestasi.
2. Membangun sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan lembaga terkait secara optimal dalam pencapaian prestasi daerah
3. Meningkatkan potensi pariwisata menuju pemberdayaan masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pendapatan asli daerah.

2.3 Dasar Pembentukan

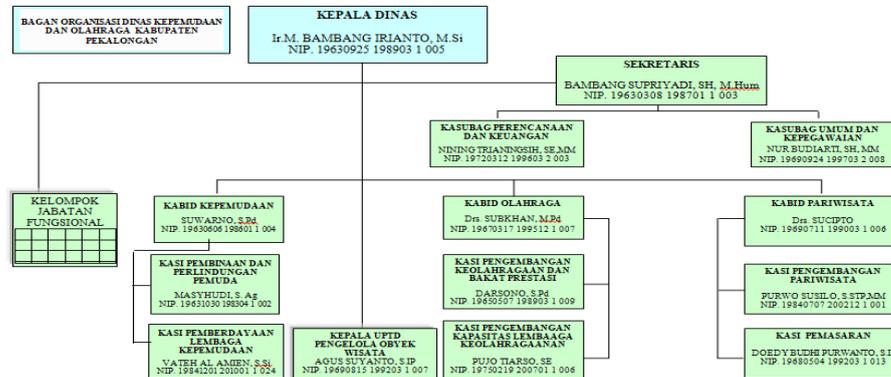
Dinporapar adalah kepanjangan dari Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. Sebelumnya Dinporapar bernama Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan atau yang disingkat Dinporaparbud. Namun pada 2009 Bidang Kebudayaan bergabung dengan Bidang Pendidikan dan menjadi dinas baru yang bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan Dinporaparbud berubah menjadi Dinporapar atau Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata. Hal ini dikukuhkan dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah.

Pada tahun 2016 ada perubahan nama Dinporapar menjadi Dinas Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan.

2.4 Struktur Organisasi

Gambar 2 2 Struktur Organisasi DINPORAPAR

Sumber: Arsip DINPORAPAR (2020)



Berdasarkan diagram diatas maka dapat dilihat bahwa pada DINPORAPAR terdapat beberapa bagian yaitu Kepala dinas, Sekretariat, Bidang Pariwisata, Bidang Pemuda, Bidang Olahraga serta Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas ini bertanggung jawab atas semua pegawai yang berada di DINPORAPAR

2. Sekretariat

Bagian ini bertanggung jawab dengan kepala dinas untuk membuat laporan yang perlu ditanda tangani

3. Bidang Pariwisata

Bagian ini melaporkan kegiatan yang sudah/akan dilakukan kepada sekretariat untuk meminta tanda tangan kepala dinas

4. Bidang Pemuda

Bagian ini melaporkan kegiatan yang sudah/akan dilakukan kepada sekretariat

untuk meminta tanda tangan kepala dinas

5. Bidang Olahraga

Bagian ini melaporkan kegiatan yang sudah/akan dilakukan kepada sekretariat untuk meminta tanda tangan kepala dinas

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagian ini memiliki tugas untuk membantu segala bidang yang membutuhkan

2.5 Job Description

Setiap bagian yang ada pada DINPORAPAR memiliki tugas dan wewenang yang berbeda. DINPORAPAR sendiri terdiri dari 3 bagian yaitu Bagian Pemuda, Bagian Olahraga dan Bagian Pariwisata. Berikut tugas pada setiap bagian:

1. Bidang Pemuda

Bagian ini memiliki tugas untuk menjalin silaturahmi antar organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Pekalongan. Selain itu bagian ini juga bertugas untuk menseleksi pemuda yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk mengibarkan bendera pada saat hari kemerdekaan Indonesia.

2. Bidang Olahraga

Bagian ini memiliki tugas menjalin silaturahmi dengan para atlet dan juga bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk menyaring pemain terbaik untuk mewakili Kabupaten Pekalongan ketingkat Provinsi maupun Nasional.

3. Bidang Pariwisata

Bagian ini memiliki tugas untuk menjalin silaturahmi dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) se-Kabupaten Pekalongan dan memberi pelatihan untuk seluruh Pokdarwis maupun warga sekitar untuk mengelola dan mengembangkan potensi wisata dengan baik dan benar.

2.6 Pihak-Pihak yang bekerja sama dengan DINPORAPAR

Untuk mempermudah segala rencana yang telah dibuat oleh DINPORAPAR maka diperlukan adanya kerjasama dengan berbagai pihak. Kerjasama ini saling menguntungkan kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Pihak-pihak yang bekerjasama dengan DINPORAPAR antara lain:

1. Bidang Pemuda

Demi kelancaran segala acara yang dibuat oleh bidang pemuda maka bidang ini bekerja sama dengan berbagai organisasi pemuda yang ada di Kabupaten Pekalongan dan juga para pengusaha.

2. Bidang Olahraga

Untuk mencari bibit atlet muda, bidang olahraga bekerja sama dengan MGMP se-Kabupaten Pekalongan. Bidang ini juga bekerja sama dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) untuk mengurus atlet dari berbagai cabang olahraga.

3. Bidang Pariwisata

Bidang ini menjalin kerjasama dengan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) yang ada di Kabupaten Pekalongan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki di daerahnya. Bidang ini juga bekerja sama dengan berbagai event organizer untuk membuat berbagai event di objek wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan.

2.7 Program kerja yang sudah terlaksana

Banyak program kerja yang telah direncanakan oleh DINPORAPAR, namun pandemi COVID-19 melanda seluruh daerah di Indonesia menyebabkan rencana

yang telah dibuat terpaksa ditunda agar tidak menambah jumlah pasien yang terkena pandemi tersebut dan juga alokasi dana dipotong untuk menyembuhkan penderitanya. Tetapi tidak semua rencana yang direncanakan tersebut ditunda ada beberapa yang terlaksana yaitu:

1. Pelatihan tata kelola destinasi Pariwisata

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang tata kelola destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pekalongan agar bisa lebih berkembang dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung.

Gambar 2.3 Kegiatan Pelatihan Tata Kelola Destinasi Wisata

Sumber: Arsip DINPORAPAR (2020)



2. Pelatihan Ekowisata Ecopark (Pemandu Wisata)

Pelatihan ini bertujuan untuk mengajak warga sekitar agar menjadi pemandu wisata supaya para wisatawan mengerti cerita dibalik terbentuknya wisata tersebut.

Gambar 2 4 Pelatihan Ekowisata Ecopark (Pemandu Wisata)

Sumber: Arsip DINPORAPAR (2020)



3. Pelatihan Home Stay

Pelatihan ini bertujuan untuk menambah pendapat masyarakat sekitar objek wisata dengan mendirikan home stay untuk para wisatawan yang berkunjung.

Gambar 2 5 Pelatihan Homestay

Sumber: Arsip DINPORAPAR (2020)



4. Festival Durian

Festival ini rutin diselenggarakan setiap tahunnya pada bulan Februari. Festival ini sebagai rasa syukur dari para petani durian terhadap hasil panen yang melimpah dan juga dapat meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung pada daerah ini.

Gambar 2 6 Kegiatan Festival Durian Kabupaten Pekalongan

Sumber: Arsip DINPORAPAR (2020)



2.8 Program Kerja yang akan Dilaksanakan

1. POPDA

Pekan Olahraga Daerah atau yang sering disebut dengan POPDA. Acara ini rutin dilakukan setiap tahunnya diberbagai daerah diantaranya Kabupaten Pekalongan. POPDA ini bertujuan untuk menjalin silaturahmi antar pemain dan sebagai ajang seleksi untuk mencari atlet yang terbaik pada tingkat daerah. POPDA ini bekerja sama dengan MGMP agar mencari atlet yang terbaik pada sekolahannya.

Gambar 2 7 Pelaksanaan kegiatan POPDA Kabupaten Pekalongan

Sumber: Arsip DINPORAPAR (2021)



2. Seleksi Paskibra

Pasukan Pengibar Bendera atau sering disebut juga Paskibra. Acara ini rutin dilakukan oleh bidang pemuda untuk menyaring seluruh pelajar tingkat SMA/Sederajat yang ada di Kabupaten Pekalongan.

Gambar 2 8 Kegiatan seleksi Paskibra Kabupaten Pekalongan
Sumber: Arsip DINPORAPAR (2021)



BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Tinjauan Teori

Beberapa teori yang digunakan untuk mendukung penelitian ini diantara lain:

3.1.1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A. and Muhammad Syam Kusufi (2014) Anggaran adalah rencana operasional yang dinyatakan dalam satuan uang dari suatu organisasi, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan biaya/pengeluaran dan di pihak lain menggambarkan perkiraan pendapatan/penerimaan guna menutupi pengeluaran tersebut, untuk suatu periode tertentu yang umumnya 1 (satu) tahun.

Menurut Haryanto and Arifuddin (2018) Anggaran merupakan sebuah pedoman untuk melakukan sebuah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintahan diantaranya: rencana pendapatan LRA, belanja, transfer, surplus/defisit LRA dan pembiayaan yang diukur dalam mata uang rupiah serta dibuat sesuai klasifikasi tertentu dalam suatu periode.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan sebuah rancangan keuangan pemerintah daerah yang dibuat setiap setahun sekali dan disetujui oleh dewan legislatif daerah.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK. (2018) Anggaran

sektor publik merupakan rancangan aktivitas yang berbentuk perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Ada beberapa aspek yang wajib ada didalam anggaran sektor publik ini yaitu: 1) Aspek Perencanaan, 2) Aspek Pengendalian dan 3) Aspek Akuntabilitas Publik. Anggaran sektor publik ini perlu dibuat dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Anggaran dalam sektor publik ini sangat diperlukan karena ada beberapa alasan, antara lain:

1. Anggaran merupakan suatu alat untuk sebuah pemerintahan untuk menentukan pembangunan sosial ekonomi, menjamin masyarakat secara terus-menerus dan diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2. Anggaran juga penting karena kebutuhan dan keinginan masyarakat yang tak terhingga dan terus meningkat akan tetapi sumber daya yang dimilikinya hanya sedikit.
3. Anggaran dibutuhkan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa pemerintah telah bertanggung jawab atas kepercayaannya untuk mengelola sebuah wilayah.

Anggaran juga memiliki fungsi utama, yaitu:

1. Anggaran sebagai alat perencanaan (Planning Tool)

Anggaran adalah suatu persiapan yang dilakukan oleh suatu instansi untuk mengetahui tindakan yang dilakukannya, berapa

total biaya yang diperlukan serta berapa banyak hasil yang didapat untuk mencapai sebuah tujuan.

2. Anggaran sebagai alat pengendalian (Control Tool)

Anggaran dibuat sebagai pertanggungjawaban biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan agar biaya tersebut tidak berlebihan, kekurangan maupun salah sasaran.

3. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran juga dapat berfungsi untuk menguatkan keadaan ekonomi serta menghidupkan perkembangan ekonomi masyarakat lalu dapat memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional.

4. Anggaran sebagai alat politik (Political Tool)

Anggaran berfungsi untuk alat politik maksudnya adalah anggaran ini merupakan tanggung jawab atas kepemimpinan suatu kepala daerah terhadap rakyatnya yang telah menggunakan hak pilihnya.

5. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (Coordination and Communication Tool)

Anggaran ini diperoleh dengan cara koordinasi antar bagian yang ada di dalam pemerintahan. Anggaran ini harus disampaikan kesemua bagian divisi untuk dilakukan secara optimal.

6. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (Performance Measurement Tool)

Anggaran merupakan bentuk keterikatan antara pemerintah dengan rakyat. Penilaian kinerja ini dilihat dari seberapa besar realisasi yang telah dilakukan.

7. Anggaran sebagai alat motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat berfungsi untuk memotivasi seluruh pegawai pemerintahan supaya melakukan pekerjaannya secara ekonomis, efektif dan efisien agar mencapai target yang diinginkan dan tujuan yang sudah disepakati bersama.

8. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (Public Sphere)

Seluruh elemen yang ada dimasyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan anggaran ini demi terlaksananya anggaran yang sesuai dengan aspirasi rakyat

3.1.2. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A. and Muhammad Syam Kusufi (2014) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK., (2018) Dalam sebuah pemerintahan pendapatan ini terdiri dari 2 jenis yaitu: Pendapatan

Laporan Operasional (LO) dan Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

1. Pendapatan Laporan Operasional (LO)

Pendapatan laporan operasional merupakan sebuah hak yang dimiliki oleh pemerintah daerah yang diakui sebagai nilai tambah ekuitas tetapi tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan LO ini terdiri dari:

- a. Pendapatan Pajak Daerah
- b. Pendapatan Retribusi
- c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- d. Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah
- e. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
- f. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya
- g. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
- h. Pendapatan-Pendapatan Lainnya
- i. Surplus Non Operasional-LO
 - 1.Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
 - 2.Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang
- j. Pendapatan Hibah LO Berupa Barang
- k. Pendapatan Luar Biasa.

2. Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pendapatan Laporan Realisasi Anggaran merupakan seluruh pendapatan rekening kas umum daerah penambah saldo anggaran lebih dalam suatu periode.

Pendapatan LRA dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- b. Pendapatan Transfer
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

3.1.3. Belanja Daerah

Menurut Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A. and Muhammad Syam Kusufi (2014) Belanja adalah penurunan aset dan/atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan dalam satu periode akuntansi, sedangkan belanja daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja menurut basis kas adalah semua pengeluaran oleh bendahara umum negara/daerah yang mengurangi ekuitas dana jangka pendek dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah, sedangkan menurut basis akrual, belanja merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK., (2018) Belanja merupakan semua pengeluaran uang dari rekening kas umum daerah

yang mengurangi jumlah saldo anggaran lebih dalam suatu periode tahun anggaran.

Dalam pemerintahan belanja terdiri dari:

1) Belanja Operasional

Belanja Operasional merupakan kegiatan mengeluarkan sejumlah uang untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek.

2) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan imbalan terhadap pegawai yang berupa uang ataupun barang karena bekerja didalam instansi pemerintahan.

3) Belanja Barang dan Jasa

Belanja ini merupakan sebuah pengeluaran dana anggaran sebagai pengadaan barang yang sudah rusak atau tidak dapat digunakan serta membayar jasa dalam melaksanakan sebuah program dan kegiatan yang diadakan oleh instansi pemerintahan.

4) Belanja Bunga

Belanja Bunga adalah pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (interest) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (principal outstanding) termasuk beban pembayaran biaya-

biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah.

5) Belanja Subsidi

Belanja Subsidi adalah pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada suatu perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

6) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang maupun jasa kepada pemerintah yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.

7) Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok maupun masyarakat yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari risiko yang akan terjadi.

8) Belanja Modal

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Menurut Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A. and Muhammad Syam

Kusufi (2014) Belanja modal merupakan anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya untuk memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Yang termasuk belanja modal diantaranya yaitu:

- a. Belanja tanah
- b. Belanja peralatan dan mesin
- c. Belanja modal gedung dan bangunan
- d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan
- e. Belanja aset tetap lainnya
- f. Belanja aset lainnya.

3. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tak biasa dan tidak diharapkan berulang.

Menurut Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A. and Muhammad Syam Kusufi (2014) Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

- ### 4. Belanja Transfer
- Belanja Transfer merupakan belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut lampiran E.XXIII Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, tranfer pemerintah terdiri atas:

- a. Bagi hasil pajak ke kabupaten/kota
- b. Bagi hasil retribusi ke kabupaten/kota
- c. Bagi hasil pendapatan lainnya ke kabupaten/kota

Adapun transfer pemerintah kabupaten/kota meliputi transfer bagi hasil ke desa yaitu:

- a. Bagi hasil pajak
- b. Bagi hasil retribusi
- c. Bagi hasil pendapatan lainnya.

3.1.4. Kinerja Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja Keuangan yaitu tingkat pencapaian dari sebuah target kegiatan keuangan pemerintah daerah yang diukur melalui beberapa indikator keuangan yang dapat dinilai dari hasil pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dinyatakan bahwa kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan atau program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Menurut Halim (2007: 71), kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

Menurut PP 71 Tahun 2010 laporan kinerja keuangan sekurang-kurangnya menyajikan pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan dari kegiatan operasional
2. Beban berdasarkan klasifikasi fungsional dan klasifikasi ekonomi
3. Surplus atau defisi

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah bisa diukur dengan beberapa cara, diantaranya:

1. Menggunakan Rasio efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio efektivitas ini dilakukan dengan cara melihat laporan keuangan dari tahun ke tahun. Suatu pemerintah daerah dikatakan efektif kinerjanya apabila dapat merealisasikan PAD yang telah direncanakan melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan potensi yang dimilikinya. Untuk menilai efektivitas kinerja keuangan dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Suatu laporan keuangan pemerintahan dapat dikatakan efektif maupun tidak apabila:

Tabel 3. 1
Tingkat Efektivitas PAD

Efektivitas Keuangan Daerah	Rasio Efektivitas
Efektif	>100%
Efektif berimbang	=100%
Tidak Efektif	<100%

2. Menggunakan Rasio Pertumbuhan PAD

Mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio pertumbuhan ini dengan cara membandingkan laporan keuangan dari tahun ke tahun. Apabila terdapat peningkatan PAD dari sebelumnya maka pemerintah dapat dikatakan berhasil.

Untuk mengukur kinerja keuangan menggunakan rasio ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pertumbuhan PAD} = \frac{\text{PAD}_{t-(t-1)}}{\text{PAD}_{-1}} \times 100\%$$

Dimana: t=Tahun Berjalan

t-1 = Tahun Sebelumnya

3.2. Tinjauan Praktik

Banyak wisata yang tersebar di Kabupaten Pekalongan akan tetapi wisata tersebut tidak seluruhnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Wisata

tersebut bisa dikelola oleh warga sekitar maupun kelompok sadar wisata (POKDARWIS). Ada beberapa objek wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu diantaranya:

3.2.1. Objek Wisata Linggo Asri

Objek wisata ini terletak disebelah selatan Kabupaten Pekalongan. Wisata ini memiliki beberapa spot fotografi yang cukup menarik bagi wisatawan segala usia baik pria maupun wanita. Pada objek wisata ini terdapat juga kandang gajah sehingga kita dapat mengelilingi wisata ini dengan menggunakan gajah tersebut. Wisata ini cukup murah yaitu dengan harga tiket masuk sebesar Rp.5000/orang serta biaya parkir sebesar Rp.2000 untuk motor dan Rp.5000 untuk mobil. Biaya untuk mengelilingi wisata dengan gajah yaitu Rp.10.000.

Gambar 3. 1
Objek Wisata Linggo Asri



3.2.2. Buper Linggo Asri

Objek wisata ini terletak berseberangan dengan Objek Wisata Linggo Asri. Wisata ini memiliki fasilitas berupa gazebo, aula, lapangan olahraga, paintball dan juga flying fox. Wisata ini sangat murah dengan harga tiket masuk sebesar Rp.4000 untuk hari senin-jumat sedangkan untuk hari sabtu-minggu sebesar Rp.4500. Apabila ingin bermain paintball cukup membayar Rp.50.000/orang dan jika peluru yang digunakan sudah habis bisa ditambah lagi dengan biaya Rp.1.000/butir. Untuk menikmati wahana flying fox cukup membayar Rp.15.000.

Gambar 3. 2
Bumi Perkemahan Linggo



3.2.3. Objek Wisata Pantai Depok

Objek wisata ini terletak dibagian utara Kabupaten Pekalongan tepatnya dikecamatan Depok kurang lebih 7 km dari jalur pantura. Wisata ini memiliki spot foto yang menarik pengunjung segala usia. Wisata ini biasanya dimanfaatkan untuk bermain air disekitaran pantai. Tiket masuk objek wisata ini sangat murah yaitu Rp 2.750 untuk hari biasa sedangkan Rp 3.750 untuk hari minggu/hari besar.

Gambar 3. 3
Objek Wisata Pantai Depok



3.2.4. Kinerja Laporan Keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020

Dari pengamatan yang dilakukan pada 3 objek wisata yang dikelola oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan jumlah wisatawan yang berkunjung sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Rekapitulasi Pengunjung Objek Wisata 2016-2020

Tahun	Jumlah Pengunjung
2016	116.307
2017	129.542
2018	140.430
2019	236.244
2020	115.756

(Sumber: Dok. DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan, 2021 (Data diolah))

Hasil pengukuran kinerja keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dengan melihat rasio pertumbuhan adalah sebagai berikut:

A. Rasio Efektivitas PAD Tahun 2016-2020

Hasil perhitungan rasio efektivitas perolehan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3. 3
Rasio Efektivitas PAD Tahun 2016-2020

Tahun	Target Penerimaan	Realisasi	Efektivitas
2016	594.000.000	600.358.500	101,07%
2017	608.500.000	611.293.500	100,46%
2018	700.000.000	667.865.500	95,41%
2019	1.150.000.000	1.697.036.500	147,57%
2020	801.104.050	802.135.500	100,13%

(Sumber: Dok. DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan, 2021 (Data diolah)

Berdasarkan data yang telah diolah, tingkat keefektifan PAD Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup stabil, namun pada tahun 2018, Pendapatan asli daerah DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan. Pada tahun 2016,2017,2019 dan 2020 seluruh penerimaan pendapatan asli daerah telah melebihi target dengan persentase diatas 100% dan dikatakan efektif. Target pencapaian perolehan pendapatan asli daerah Kabupaten Pekalongan pada tahun 2018, hanya sebesar 95,41% karena adanya beberapa hal dalam hasil perolehan sehingga perolehan DINPORAPAR kurang sesuai dengan target yang telah ditentukan.

B. Rasio Pertumbuhan (trend)

Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, Belanja Modal yang dikeluarkan oleh Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 4
Rekapitulasi Belanja Modal 2016-2020

Tahun	Belanja Modal
2016	Rp 2.510.896.250
2017	Rp 2.716.628.500
2018	Rp 5.017.735.737
2019	Rp 5.017.735.737
2020	Rp 2.994.165.248

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Tabel 3. 5
Rasio Pertumbuhan 2016-2020

Tahun	Pertumbuhan PAD	Pertumbuhan Belanja Modal
2016	-	-
2017	1,82%	8%
2018	9,25%	85%
2019	154,10%	0%
2020	-52,73%	-40%

Sumber: Dok. DINPORAPAR,2021 (data diolah)

Berdasarkan hasil perhitungan yang telah diolah, kondisi pertumbuhan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan bersifat stabil. Kondisi pertumbuhan pendapatan asli daerah dan pertumbuhan belanja modal selalu meningkat dengan signifikan hal ini dapat dilihat pada tahun 2019 rasio pertumbuhannya sebesar 154,10%. Pada tahun 2020 terdapat wabah COVID-19 yang menyebabkan berkurangnya jumlah anggaran pendapatan dan belanja daerah yang mengakibatkan turunnya jumlah pendapatan dan belanja Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

BAB IV PENUTUP

4.1. Simpulan

Dari hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa kemampuan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan tahun 2016-2020 dapat dikatakan sudah efektif karena setiap tahun dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan persentase terendahnya yaitu 95,41%. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan juga dikatakan berhasil untuk meningkatkan pendapatan daerah karena setiap tahun mengalami peningkatan.

Belanja modal juga berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan hal ini ditunjukkan dengan hasil uji rasio pertumbuhan pada laporan keuangan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. Semakin meningkat belanja yang dikeluarkan maka banyak pula jumlah wisatawan yang berkunjung dan mengakibatkan meningkatnya jumlah pendapatan Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan.

4.2. Saran

Untuk Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan agar dapat lebih mengembangkan potensi wisata alam yang dimiliki oleh Kabupaten Pekalongan sehingga pendapatan yang diterima akan semakin banyak serta memanfaatkan teknologi terkini terutama pada masa pandemi COVID-19 agar tetap bisa menarik wisatawan baik dari berbagai wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwanis, D. and Saputra, R. (2014) „Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya Pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh)“, *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 1(2), pp. 183–199. doi: 10.24815/jdab.v1i2.3628.
- Haryanto, C. and Arifuddin, C. (2018) „Kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi“, *Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi*, 1(71), p. 298.
- Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., A. and Muhammad Syam Kusufi, S. E. (2014) *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. 1st edn. Salemba Empat.
- Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., AK., C. (2018) *Akuntansi Sektor Publik - Edisi Terbaru*. ANDI Yogyakarta.
- Ririn, T., Murdayanti, Y. and Prihatni, R. (2014) „PENGARUH BELANJA MODAL, INVESTASI, DAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH Theodora Ririn, Rida Prihatni, Yunika Murdayanti, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta“, *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*, 9(1).
- Fitri, Devilian, D. (2014) „Pengaruh Sektor Pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan“, *Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan, (Pendidikan Ekonomi STKIP PGRI Sumatera Barat)*, pp. 4–14.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran A. Surat Diterima Magang



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jl. Krakatau No.09 Telp. (0285) 381456, 381010 Fax. (0285) 381789
e-mail : bappedalitbang@pekalongankab.go.id

KAJEN

Kode Pos 51161

Kajen, 24 November 2020

Nomor : 070/143
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Ijin Magang

Kepada Yth.,
Ketua Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP
di
SEMARANG

Memperhatikan Surat Ketua Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP Universitas Diponegoro Nomor: 2006/UN7.6.3/AK/2020 tanggal 18 November 2020 Perihal Ijin magang kami yang bertandatangan di bawah ini Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan, menyatakan tidak keberatan atas penggunaan lokasi untuk melakukan Kegiatan Kerja Praktik/ Magang di wilayah Kabupaten Pekalongan yang dilaksanakan oleh:

1. Nama : ARYO LELONO
2. NIPM/NPM: 40011018060052
3. Jurusan : Akuntansi

Di DINPORAPAR Kab. Pekalongan mulai dari 04 Januari 2021 s.d 31 Maret 2021.
Dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kegiatan Kerja Praktik tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintahan.
- b. Sebelum melaksanakan Kerja Praktik di lokasi yang telah ditentukan, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Kepala OPD/ Penguasa Wilayah setempat.
- c. Setelah kegiatan Kerja Praktik selesai supaya langsung melaporkan hasilnya kepada Bappeda Litbang Kabupaten Pekalongan .

Demikian Izin ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

a.n. KEPALA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Bidang Litbang

Drs. M. Edy Yuliantono, M.M
Pembina
NIP 196507271995031006

Tembusan :
1. Kepala DINPORAPAR Kabupaten Pekalongan ;
2. Yang Bersangkutan.

Lampiran B. Surat Permohonan Data



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
LEMBAGA PENGELOLA PROGRAM STUDI DILUAR KAMPUS
UTAMA (LPPSDKU)

Gedung SAMWA lantai 1
Jalan Prof. Sudarto, S.H. Kode Pos 50275
Telepon (024) 7460320, Fax (024) 7460013
email: psdku@iain-undip.ac.id
iainpsdku.undip.ac.id

Nomor : 264 /UN7.6.3/AK/2021
Lampiran :
Hal : Ijin Permohonan Data

Yth. Kepala DINPORAPAR
Kabupaten Pekalongan
Di
Kajen

Sehubungan dengan kegiatan Kerja Praktek yang sedang dilakukan oleh mahasiswa PSDKU Universitas Diponegoro, maka mahasiswa diwajibkan untuk membuat laporan mengenai kegiatan Kerja Praktek yang sedang dilaksanakan. Oleh sebab itu kami selaku pihak Lembaga pengelola PSDKU memohon agar pihak Instansi tempat mahasiswa melakukan Kerja Praktek dapat memberikan bantuan kepada mahasiswa berupa data, wawancara atau keperluan mahasiswa lainnya terkait dengan pembuatan laporan yang harus dilakukan oleh mahasiswa setelah selesai melaksanakan Kerja Praktek.

Mahasiswa PSDKU Universitas Diponegoro yang mengajukan permohonan ini adalah:

Nama	: Aryo Lelono
NIM	: 40011018060052
Program Studi	: D3 Akuntansi
Alamat Rumah	: Jalan Parang Garuda 2 no 24 Perumahan Medono Indah Pekalongan
No. Telepon/HP	: 085641379248
Alamat Email	: Aryolelono20@gmail.com
Tempat Kerja Praktek	: DINPORAPAR Kab. Pekalongan

Demikian permohonan kami. Atas segala bantuan serta kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.



Semarang, 22 Maret 2021
Ketia Lembaga Pengelola PSDKU UNDIP

Dr. Redyanto Noor, M.Hum.
NIP.195903071986031002

Lampiran C. Hasil Rekapitulasi Belanja DINPORAPAR

Tahun	Rincian	Pagu Anggaran	Realisasi
2016	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 1.085.000.000	Rp 1.052.945.000
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Rp 970.000.000	Rp 966.271.250
	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 505.000.000	Rp 491.680.000
2017	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 1.215.000.000	Rp 1.169.838.500
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Rp 900.000.000	Rp 893.140.000
	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 657.600.000	Rp 653.650.000
2018	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 1.011.240.000	Rp 1.001.637.383
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Rp 4.002.961.600	Rp 3.392.883.454
	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 653.610.000	Rp 623.214.900
2019	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 1.011.240.000	Rp 1.001.637.383
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Rp 4.002.961.600	Rp 3.392.883.454
	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 653.610.000	Rp 623.214.900
2020	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rp 790.343.600	Rp 659.684.448
	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Rp 2.100.396.600	Rp 1.987.367.600
	Program Pengembangan Kemitraan	Rp 348.560.200	Rp 347.113.200